BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan

2.1.1 Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu usaha untuk menemukan tatanan, menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu ada dalam hubungan yang sah dengan peristiwa-peristiwa lainnya, selain itu pengetahuna menjadi suatu disposisi yang lebih terkait dengan fakta-fakta.

Menurut Plumer pengetahuan menjadi faktor yang mempengaruhi keikutsertaan atau partisipasi dikarenakan pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut, hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.(Notoatmodjo, 2014)

Pengetahuan juga disebut sebagai hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan yang sebut juga kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terciptanya tindakan seseorang(Notoatmodjo, 2014)

2.1.2 Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hal penting dari segala hal, dijelaskan pula bahwa pengetahuan mencakup enam tingkatan diantaranya:

1. Mengingat (Remembering)

Kemampuan menyebutkan kembali informasi/pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan dengan kata lain seseorang tahu/bertambah pengetahuannya.

2. Memahami (Understanding)

Kemampuan untuk memahami instruksi juga menegaskan pengertian dan makna ide atau konsep yang telah diajarkan baik dalam berbagai bentuk lisan, tertulis, maupun lainya.

3. grafik/diagramAplikasi/Menerapkan (Applying)

Kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu dalam menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang nyata atau sesungguhnya.

4. Analisis (Analyzing)

Analisis adalah suatu kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan, kemudian mencari hubungan antara materi atau objek kedalam komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah..

5. Menilai (Evaluating)

Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau patokan tertentu, dengan kata lain dapat menjustifikasi suatu materi atau objek tertentu.

6. Mencipta (Creating)

Kemampuan mencampurkan unsur-unsur menjadi suatu bentuk baru dan utuh, ataupun membuat sesuatu menjadi orisinil.

Menurut Arikunto untuk mengukur suatu pengetahuan masyarakat dari hasil kuesioner yang telah disebar dan diisi, maka dapat dilihat darikategori hasilukur pengetahuan dengan kategoriBaik : ≥75%, Cukup 56-74 %, dan Kurang :<55 %.(Arikunto, 2013)

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Penegetahuan yang didapat akan dipengaruhi oleh faktor internal maupun ekternal (Suarjana, 2010) faktor tersebut yaitu:

2.1.3.1 Faktor internal

1. Pendidikan

(Notoatmodjo, 2012) Megaitkan kutipan dari tokoh pendidikan pada abad ke 20 M. J.Largevert . mendefinisikan pendidikan sebagai tiap bagian dari usah, pengaruh, perlindungan, yang ditunjang untuk melindungi anak terhadap kedewasaan. sedangkan menurut GBHN Indonesia, mendefinisikan sebagai bahwa pendidikan adalah usaha dasar untuk menjadi keperibadian dan kemampuan yang optimal diluar maupun didalam sekolah dan jangkauan waktunya selama seumur hidup.

2. Minat

Di definisikan sebagai keingianan yang tinggi dengan adanya pengetahuan yang tinggi dan cukup dari seseorang, menjadi apa yang kemudian di harapkan.

3. Pengalaman

Di definisikan sebagai serangkaian peristiwa yang telah dialami dan dirasakan oleh seseorang. (middle.broke, 1947) dikutip oleh Anwar (2013) menyatakan suatu dampak psikologis cenderung bersikap negatif terhadap pribadi harus meningalakan kesan yang menemui situasi yang melibatkan emosional, penghayatan, lebih mendalam dan akan memiliki bekas tersendiri.

4. Usia

Di definisikan sebagai individu yang terhitung sejak lahir sampai saat berulang tahun. Kematangan usia ditunjang dalam bersikap, berpikir dan bekerja, dari segi penilain masyarakat padaumumnya dilihat dari kematangan usia dapat diperhatikan dalam bersikap menyelesaikan masalah yang dihadapi . makin bertambah usia seseorang dapat dipertimbangkan dengan koping yang kondusif dalam mengahadpi setiap masalah yang di hadapi.

2.1.3.2 faktor eksternal

1. Informasi

Didefinisikan sebagai pemberitahuan yang diberikan menegenai hal yang baru atau lampau memberikan suatu hal

kognitif baru yang akan mempengarui terbentuknya sikap, pendekatan ini biasanya dilakukan mengunakan media massa. Berupa penegetahuan untuk mempegaruhi sikap dan perubahan perilaku.

5. Kebudayaan/lingkungan

Didefinisiakan sebagai pengetahuan tentang daerah atau lingkungan dimana kita tinggal, akan mempengaruhi sebagian besar dalam bersikap dan mempegaruhi kultur seseorang dalam membentuk suatu kebiasan dan bersikap seseorang. menerangkan bahwa pengetahuan mengenai

kebencanaan adalah: sebuah peristiwa yang dikenang dalam ingatan seseorang, mengenai bagaimana terjadinya sebuah bencana alam baik faktor alam maupun faktor non alam, yang merugikan dan memiliki dampak psikologis maupun dampak sosial yang di alami .

2.2 Bencana

(Budiman, 2013) menerangkan bahwa yang dimaksud bencana sendiri merupakan suatu kejadian alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri ataupun perpaduan kedua itu secara tiba-tiba sehingga menimbulakan dampak negatif. Pendapat ini di tunjang dengan adanya pasal 1 (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Tentang penanggulangan bencana yang menerangkan bahwa bencana adalah suatu rangkaian peristiwa yang mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat yang di

sebabkan dari faktor alam dan non alam dan faktor manusia itu sendiri yang menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan kerugian material dan imaterial perubahan juga perubahan psikologi itu sendiri.(BNPB, 2018)

2.2.1 Jenis-jenis bencana

- Bencana alam merupakan bencana yang timbul karena serangkaian peristiwa alam disebabkan oleh bencana berupa: Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banjir, Kekeringan, Angin Topan, Pergeseran Tanah Atau Lonsor.
- Bencana nonalam merupakan bencana yang timbul karena peristiwa yang diakibatkan oleh gagalnya teknologi seperti radiasi kebocoran reaktor nuklir, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 3. Bencana sosial disebabkan oleh serangkaian di sebabkan oleh manusia yang meliputi: konflik antar kelompok atau etnis masyarakat, dan teror. Saat konflik ini terjadi kondisi masyarakat sangat kacau dan sangat dinamis menciptakan fisik, emosianal, dan kekacauan sosial . pase kondisi ini sangatlah darurat. Komunikasi sangalah diperlukan dalam hal ini untuk mengelola resiko bagi masyarakat .
- 4. Peringatan dini dalam hal ini dibutuhkan sebelum terjadi bencana dibutukan komunikasi yang bisa disebarkan dalam hal ini dibutuhkan koneksi untuk menyebarkan informasi yang ada sehingga bisa meredam konflik itu sendiri, termasuk penggunaan GPS (Global Positioning system) memiliki peranan penting untuk pelacakan bahaya dan

peringatan dari pihak terkait dari keadaan yang nampak sehingga dapat menilai bagaimana bisa direkontruksi dan rekonsiliasi (Susanto, 2006).

2.2.2 Perencanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.(BNPB, 2018)

 Pada tahap Prabencana dalam tahapan atau situasi tidak terjadi bencana, dapat dilakukan

penyusunan perencana penanggulangan dampak bencana (*Disaster Management Plan*), hal ini merupakan rencana umum dan menyeluruh untuk meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara mendetail untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi seperti Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta.

2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).

- Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
- 4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana(Nursing Emergency Asosiation, 2018)

2.3 Longsor

2.3.1 Definisi Longsor

Lonsor atau (*slide*) merupakan jenis pergerakan massa yaitu: gerakan material pembentuk yang di akibatkan terjadinya keruntuhan disepanjang atau lebih dari bidang longsor (Susanto, 2006). Lempengan tanah bisa bersatu atau terpecah karena ada gangguan kesetabilan pada batuan penyangga.

Tanah Longsor ataupun longsoran merupakan salah satu jenis gerakan sebidang tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atauun keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah maupun batuan penyusun lereng tersebut.(BNPB, 2018)

Pemicu dalam terjadinya gerakan tanah ini merupakan curah hujan yang intensitasnya tinggi serta derajat kecuraman tebing. Bencana tanah longsor dapat juga sering terjadi di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya kerugian jiwa maupun harta benda. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis bencana.

2.3.2 Pemicu Terjadinya Longsor

Gangguan kesetabilan tanah ditunjang oleh morfologi kemiringan lereng kondisi ini biasanya disebabkan oleh batuan penyusun lereng , penyebab longsor dapat berupa:

- Peningkatan kandungan air dalam lereng itu sendiri yang sering disebabkan oleh curah air hujan itu sendiri.
- 2. Getaran yang di akiabtkan dari gempa bumi ataupun ledakan.
- Peningkatan beban pada kemiringan 40 derajat dapat menyebabkan longsor.
- 4. Pemotongan lereng atau kaki penyangga dapat mengakibatkan longsor.
- 5. Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng.
- 6. Perusakan hutan, lahan, bukit .(BNPB, 2018)

2.3.3 Klasifikasi longsor

Klasifikasi longsor dilihat dari kedalaman material longsor oleh Broms (1979) sebagai berikut (BNPB, 2018):

Tipe	Kedalaman
Longsoran permukaan (surface slides)	<1,5 m
Longsoran dangkal (shallow slides)	1.5-5,0 m
Longsoran dalam (deef slides)	5,0-20,0 m

Longsoran sareng dalam (very deef slides)

>20.0 m

Sumber: handriatmo (2012; 19)

2.4 Kesiapsiagaan

2.4.1 Definisi kesiapsiagaan

Menurut carter (1991) dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006) Kesiapsiagaan merupakan suatu tindakan yang bisa memungkinan pemerintah, organisasi, masyarakat, ataupun individu untuk menganalisis dalam kondisi terjadi bencana secara cepat dan tanggap guna, dalam terdapat tahap kesiapsiagaan tindakan penyusunan renacana penangulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan keanggotaan, kesiapsiagaan merupakan suatu kegiatan yang terfokus pada pengembanagn perencanaan dan analisis bencana yang terjadi secara tepat dan efektif.(LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Kesiapsiagaan merupakan bagian dalam proses manajemen bencana khususnya bencana lonsor, bertapa pentingnya kesiapsiagaan merupakan bagian dari kegiatan pro aktif dalam pengendalian pengurangan dampak juga ditekankan pada kemampuan mempersiapkan, menghadapi dalam keadaan darurat bencana secara tepat (LIPI-UNESCO/ISDR,2006)

Pada tahap ini dilakukan persiapan yang baik dengan memikirkan macam-macam tindakan agar meminimalisir dampak kerugian yang timbul akibat bencana, dan melakuakan pertolongan dan perawatan yang efektif pada saat bencana terjadi (Japanese Red Croos Society, 2009) menurut LIPI-UNESCO/IDRS (2006), dalam mengembangkan kesiapsiagaan terdapat aspek yang memerlukan perhatian lebih yaitu:(1) perencanaan dan organisasi,(2) sumber daya,(3) koordinasi,(4) koordinasi,(4)kesiapan,(5)pelatiahan dan kesadaran dimasyarakat.(LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Merupakan upaya yang di butuhkan dalam mengurangi resiko bencana itu sendiri. Meminimalisir resiko bencana terdiri dari perecanaan yang matang penangunggulangan bencana, pendidikan mengenai bencana, peringatan dini mengenai bencana, lokasi evakuasi sehinga korban bisa medapatkan pelayanan yang lebih baik, penyedian pasokan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dasar(KEMENKES RI, 2017).

2.4.2 Pelaksanaan Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan yang dilaksanakan untuk mengantisipasi probabilitas terjadinya bencana bertujuan menghindari timbulnya korban jiwa, kerugian harta maupun benda dan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada waktu bencana mulai teridentifikasi ataupun akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain(Nugroho, 2016):

- penyedian tempat-tempat siaga bencana beserta segenap unsur pendukungnya.
- Pelatihan persiapan ataupun kesiagaan teknis bagi setiap detasemen
 Penanggulangan bencana (tim SAR,pos sosial,pos kesehatan,pos prasarana dan pos pekerjaan umum).

- 3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan bencana
- 4. Penyiapan pendukung dan mobilisasi sumberdaya/logistik.
- 5. Penyiapan persiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat tanggap dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.
- Penyiapan dan persiapan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (
 early warning)
- 7. Penyusunan rencana kontinjensi (*contingency plan*)
- 8. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

2.4.3 Tujuan Kesiapsiagaan

Gregg (2004) yang di kutip oleh (Dodon, 2013) yang menjelaskan bahwa tujuan dari kesiapsiagaan itu sendiri untuk meminilkan efek yang ditimbulakan oleh bencana itu sendiri melalui tahapan tindakan pencegahan efisien, tepat, tanggap saat terjadi kondisi tanggap darurat saat terjadi bencana. Pendapat ini di tunjang dengan adanya: pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Tentang penanggulangan bencana yang menjelaskan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana yang tepat guna dalam menghadapi keadaan bencana

Kesiapsiagaan tersebut dimaksud sebagai berikut:

- 1. Kesigapan dalam perencanaan yang dilakukan dalam situasi darurat.
- 2. Pengorganisasian sistem peringatan dini bencana.
- 3. Penyedian pasokan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4. Pendidikan khusus mengenai penaganan bencana.

- 5. Penyiapan lokasi yang tepat aman untuk evakuasi.
- 6. Penyusunan data yang akurat menegenai bencana yang terjadi.
- 7. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat terjadinya bencana itu sendiri.

2.4.4 Parameter Kesiapsiagaan

Menurut LIPI- UNESCO/ISDR (2006), terdapat 5 faktor kritis yang di sepakati dalam mengukur kesiapsiagaan invidu dan pramuka penegak bantara dalam mengatisipasi bencana longsor khususnya, sebagai berikut:(Kwarnas Gerakan Pramuka, 2011)

1. Pengetahuan terhadap resiko bencana

Pengetahuan merupakan faktor yang paling utama dalam kesiapsiagaan, yang harus dimiliki individu ataupun kelompok yaitu: pemahaman terhadap bencana longsor dan pemahaman kesiapsiagaan tentang bagai mana menghadapi bencana tersebut, menyangkut bagian pemahaman dari penyelamatan diriserta peratan yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana itu sendiri.(papundu, 2005)

2. Kebijakan

Kebijakan untuk kesiapsiagaan untuk bencana lonngsor sangatlah penting dan suatu hal konkrot untuk melaksanakan kegiatan persiapan menghadapi bencana yakni: forum diskusi untuk tindakan penyelamatan diri, tindakan, serta peralatan yang dibutukan dan dipersiapkan dengan baik.

3. Rencana tanggap darurat

Rencana tanggap darurat menjadi bagian terpentting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan penyelamatan korban bencana bisa diminimalisir. Upaya ini sangatlah krusial dalam waktu terjadinya bencana dan hari pertaa setelah adaya bencana sebelum datang bantuan dari pemerintah rencana tanggap darurat meliputi 7(tujuh) komponen yaitu:

- Rencana anggota pramuka dalam merespon keadaan darurat, atau hal apa saja yang harus dilakukan dalam terjadinya kondisi longsor.
- b. Rencana evakuasi, rencana yang dibuat anggota pramuka mengenai jalur aman yang bisa dilalui dalam kondisi darurat, dan kesepakatan dalam penempatan titik kumpul saat terjadi longsor dan bisa menjadi tempat pengungsian sementara saat kondisi darurat.
- c. Pertolongan pertama yang dibutukan dakam penyelamatan , keselamatan keamanan menyangkut kebutuhan kotak P3K ataupun obat obatan penting dalam menghadapi keadaan darurat.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar, secara holistik dalam mkeadaan darurat (makanan siap saji dan minuman kemasan) ketersediaan alat komunikasi (HP/Radio) ketersediaan alat penerangan pada saat terjadi bencana seperti (batrai cadangan, lampu, jenset).
- e. Peralatan dan kelengkapan siaga bencana.
- f. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki untuk menujang kesiapsiagaan, nomr telpon rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran , PDAM, PLN, Telkom.

g. Latihan dalam simulasi kesiapsiagaan bencana.

4. Sistem peringatan bencana

Sistem peringatan bencana, dengan adanya peringatan bencana, keluarga dapat mengurangi korban jiwa, harta benda dan cara penyelamatan diri tindakan seperti apa yang harus dilakukan apabila ada peringatan dini terjadinya bencana longsor. Serta menyipkan kondisi yang efektif serta mengambil langkah untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif efisien.

5. Pengenalan Bahaya (hazard)

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan komplek. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial

Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada peta rawan kerentanan bencana tanah longsor jenis-jenis ancaman bahaya yang terdapat di wilayah / daerah yang diperoleh dari data kejadian bencana di daerah yang bersangkutan.

6. Mobilisasi sumber daya

Sumber daya keseluruhan yang tersedia meliputi pendanaan sarana dan pra sarana yang dimiliki harus menujang dan potensial yang dapat mendukung adanya kendala yang mungkin bisa terjadi pada saat krusial. Penyedian alokasi dana untuk mengahapi kebencanaan yang bisa menujang perjengkapan bencana secara reguler.(LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

2.5 Pramuka

2.5.1 Definisi pramuka

Keperamukaan adalah gerakan pendidikan kepanduan bagi kaum muda scouting, dan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan pramuka bagi anggota pramuka itu sendiri(Kwarnas Gerakan Pramuka, 2011). Pramuka kepanjangan dari praja muda karana merupakan organisasi kepanduan yang ada di Indonesia menerapkan nilai-nilai lokal seperti Tut wuri handayani dengan arti dari belakang harus mendorong, Ing madya mangun karsa ditengah harus menjadi prakarsa dan gagasan, Ing ngarsa sung tulada dari depan harus menjadi contoh dan menjadi suri tauladan. Organisasi kepandiuan ini juga tidak terbatas oleh kalangan usia muda bisa di satukan dengan satuan karya dan satu balutan sang saka merah putih .(AD dan ART Nasional pramuka. 2007)(Kwaran Gerakan Pramuka, 2011)

2.5.2 Petunjuk pelaksanaan pramuka peduli

mengembangkan potensi keperamukaaan sebagai pribadi kelompok ataupun organisasi sebagai langkah menyukseskan pengembangan sumber daya manusia dalam penaggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup dikelola secara bersama masyarakat, pemerintah, serta lembaga swadaya masyarakat yang lainya .(Kwaran Gerakan Pramuka, 2011)

membantu meringan kan beban yang timbul dimasyarakat diakibatkan oleh bencana alam (gempa, longsor, banjir, dll) serta pengupayaan pencegahan terjadinya bencana .

bidang penanggulangan bencana yaitu:

- 1. tahap pra bencana
 - a. pelatihan managemen bencana
 - b. kelompok kesehatan
 - c. pelatihan kelompok brigade penolong/ SAR
- 2. tahap tanggap darurat
 - a. kelompok brigade penolong/ SAR
 - b. kelompok bantuan sosial (dapur, logistik, pendataan dll)
- 3. tahap pasca bencana
 - a. bantuan kemanusiaan (bumbung kemanusiaan)
 - b. kelompok pekerja umum (rehabilitasi sarana/prasarana)
 - c. kemah bakti

2.6 Kerangka konseptual

Gregg (2004) yang di kutip oleh (Dodon, 2013) yang menjelaskan bahwa tujuan dari kesiapsiagaan itu sendiri untuk meminilkan efek yang ditimbulakan oleh bencana itu sendiri melalui tahapan tindakan pencegahan efisien, tepat, tanggap saat terjadi kondisi tanggap darurat saat terjadi bencana. Pendapat ini ditunjang dengan adanya: pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan
Penegetahuan yang didapat akan dipengaruhi oleh faktor internal maupun ekternal (Suparyanto, 2012)

Faktor internal

Pendidikan
Minat
Bakat
usia

Faktor eksternal

Informasi
Kebudayaan/ lingkungan

Tingkat Pengetahuan Pramuka Penegak Bantara Madrasah Aliyah Negeri 3 Cianjur Tentang Kesiapsiagaan Bencana Longsor Di Cianjur Selatan